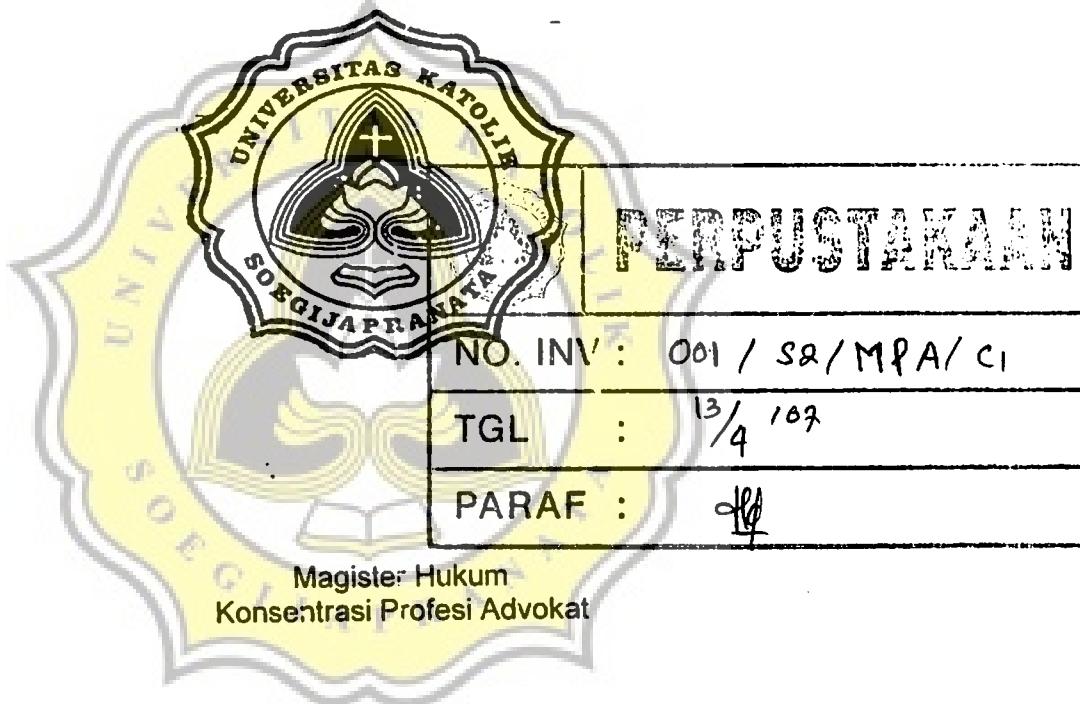


8969 .

KAJIAN TERHADAP ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KASUS PENCEMARAN DI KABUPATEN KARANGANYAR)

Tesis

untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
Derajat Sarjana S2 program studi Hukum



TRI RAHARDJO

NIM 05 93.0047

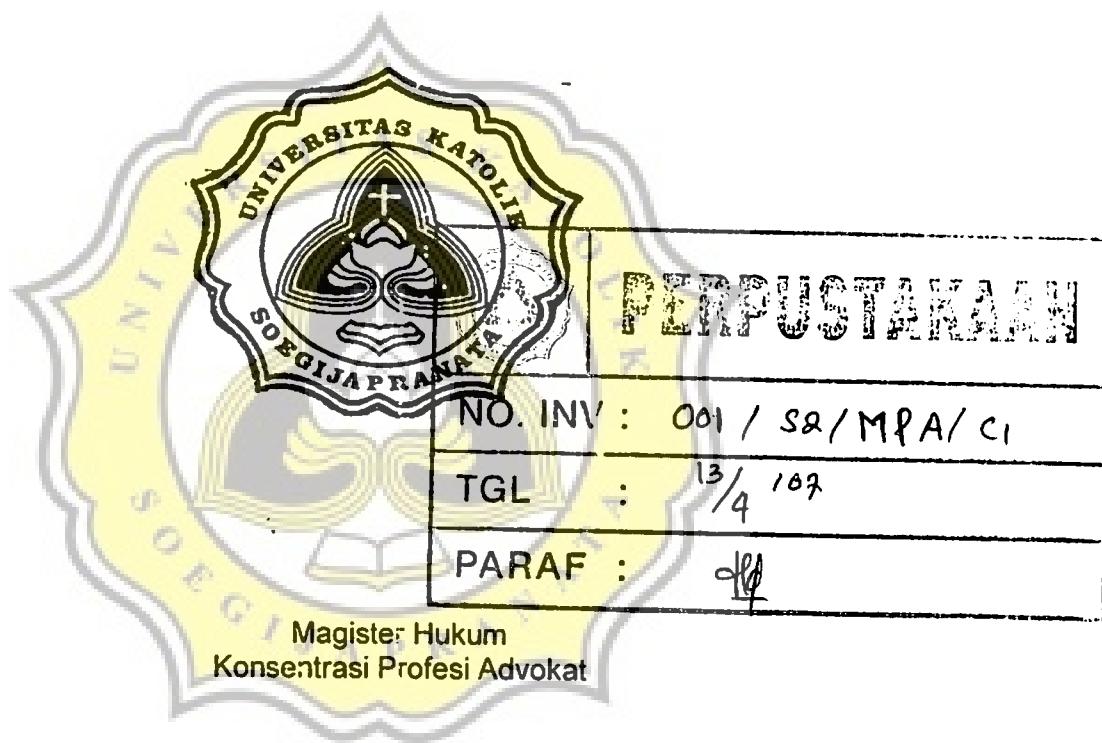
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2007

8969 .

**KAJIAN TERHADAP ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KASUS PENCEMARAN DI KABUPATEN KARANGANYAR)**

Tesis

untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
Derajat Sarjana S2 program studi Hukum



**TRI RAHARDJO**

NIM 05 93.0047

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2007

**KAJIAN TERHADAP ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
(STUDI KASUS PENCEMARAN DI KABUPATEN KARANGANYAR)**

Tesis

untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
Derajad Sarjana S2 program studi Hukum



Magister Hukum  
Konsentrasi Profesi Advokat

**TRI RAHARDJO**

NIM 05 93.0047

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2006

**TESIS**  
**KAJIAN TERHADAP ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM**  
**TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**  
**(STUDI KASUS PENCEMARAN DI KABUPATEN KARANGANYAR)**

Disusun oleh :  
TRI RAHARDJO  
Nim 05.93.0047



Pembimbing Pendamping I

Petrus Soerjowinoto, SH.M Hum  
tanggal... 27 Feb 2007

Pembimbing Pendamping II

Yovita Indrayati, SH.M Hum  
tanggal.. 27 feb 2007 .....



## **PENGESAHAH**

Tesis di susun oleh :

Nama : Tri Rahardjo, SH

Nim : 05.93.0047

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

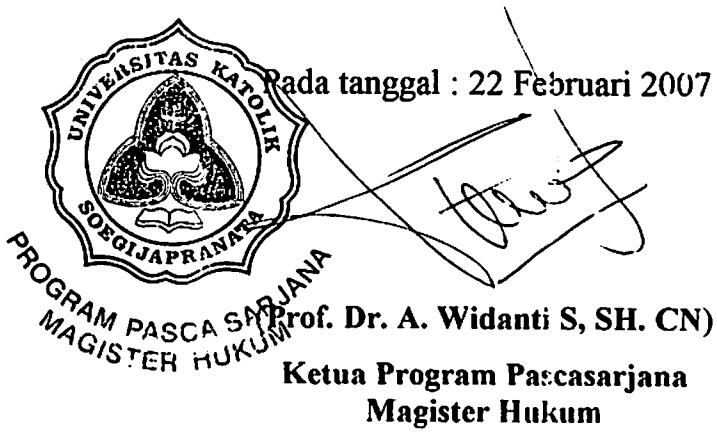
Pada tanggal : 22 Februari 2007



Dosen Pengaji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S, SH. CN
2. Petrus Soerjowinoto, SH.MHum
3. Yovita Indrayati, SH.MHum

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Profesi Advokat.



## KATA PENGANTAR

Manajatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya telah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Profesi Advokat pada program pasca sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

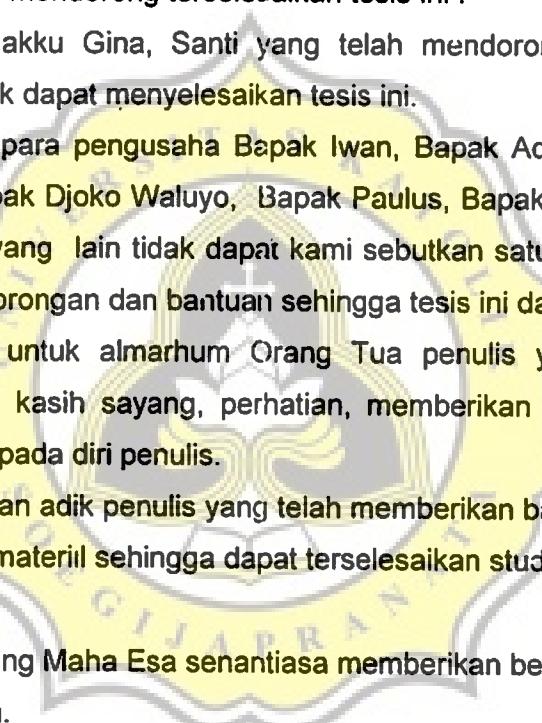
Dengan segala keterbatasan yang ada pada penulis tesis ini dengan judul "KAJIAN TERHADAP ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PENCEMARAN DI KABUPATEN KARANGANYAR)" dapat terwujud, sehingga maksud dan tujuan penelitian dapat dicapai sasaran yang diharapkan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan proses penegakan hukum pidana lingkungan hidup pada kasus pelanggaran baku mutu air limbah menjadi pilihan dalam menyelesaikan pelanggaran baku mutu air limbah dan apakah penerapan asas subsidiaritas dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup pada kasus pencemaran diberlakukan serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan asas subsidiaritas pada proses acara tindak pidana lingkungan hidup

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghormatan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak Petrus Soerjawioto,SH.M Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Yovita Indrayati,SH.M Hum selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian serta memberikan pandangan/ argumentasi/ masukkan sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Prof.Dr.A.Widanti,SH,CN yang telah memberikan saran, kritikan, masukkan demi kesempurnaan tesis ini.

Selain itu juga penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di bidang ilmu hukum konsentrasi profesi advokat.

- 
2. Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Soegijapranata Semarang beserta staf pengajar dan staf administrasi.
  3. Ir Djoko Sutrisno.M.Si Kepala Bappedal Provinsi Jawa Tengah.
  4. Tri Widodo Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar beserta teman-teman ( Bambang, Aji, Isti ) telah memberikan motivasi untuk menimba ilmu dan membantu memberikan data untuk tesis ini.
  5. Teman-teman Magister Hukum Konsentrasi Profesi Advokat UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang dalam satu keluarga besar yang telah membantu dan mendorong terselesaikan tesis ini .
  6. Isteri, anak-anakku Gina, Santi yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
  7. Teman-teman para pengusaha Bapak Iwan, Bapak Adji S, Bapak Suseno, Ibu Harini, Bapak Djoko Waluyo, Bapak Paulus, Bapak Tejo, Bapak Ari dan teman-teman yang lain tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
  8. Persembahan untuk almarhum Orang Tua penulis yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, perhatian, memberikan wawasan dan bekal menuntut ilmu pada diri penulis.
  9. Kakak-kakak dan adik penulis yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikan studi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Amin.

Semarang, 19 Pebruari 2007

Penulis

TRI RAHARDJO

NIM.05.93.0047

## DAFTAR ISI

### Halaman

Halaman Judul.....i

Halaman Persetujuan.....ii

Halaman Pengesahan.....iii

Kata Pengantar.....iv

Daftar isi.....vi

Daftar Tabel.....ix

Abstrak.....x

Abstraction.....xi

### BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang.....1

    B. Perumusan Masalah.....11

    C. Tujuan Penelitian.....11

    D. Manfaat Penelitian.....12

    E. Kerangka Tesis.....12

### BAB II KERANGKA TEORI

    A. Pengertian Lingkungan Hidup .....15

    B. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup .....16

    C. Penegakan Hukum Administrasi, Perdata dan Alternatif

        Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ..... 20

D. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	25
E. Kebijakan Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan .....	31
F. Penerapan Asas Subsidiaritas .....	36
G. Proses Acara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	38
1). Penyelidikan dan Penyidikan.....	40
2). Alat Bukti.....	43
3). Surat Dakwaan dan Penuntutan.....	45

### Bab III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Spesifikasi Penelitian.....	47
D. Obyek Penelitian.....	48
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisa Data.....	52
H. Alir Kerangka Pikir.....	53

### Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A.Diskripsi Daerah penelitian.....	55
1.Kondisi Fisik.....	58
2.Kondisi Sosial Budaya.....	60
3.Kondisi dan Potensi Pencemaran di Daerah Penelitian.....	62
B.Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup.....	73

**C.Penerapan Hukum Asas Subsidiaritas Dalam Penegakan**

**Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Kasus**

Pencemaran di Kabupaten Karanganyar.....87

1. Kasus CV Suburtek .....105

2. Kasus PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstile..... 173

3. Kasus PT Lombok Gandaria ..... 221

**D. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Acara Tindak**

Pidana Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar.....227

**Bab V.PENUTUP**

A.Kesimpulan.....234

B.Saran.....243

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran**



## DAFTAR TABEL

Tabel . 1	Beban Buangan Air Limbah Industri Pada masing-Masing sub Das ( Anak Sungai ) .....	58
Tabel. 2	Luas Wilayah, Distribusi,Kepadatan dan Pertumbuhan Pen- duduk Tahun 2005.....	61
Tabel. 3	IndustriTekstil .....	62
Tabel. 4	Industri MSG,Alkohol, Sodium Cyclamat .....	64
Tabel. 5	Industri Plastik dan Karet.....	64
Tabel. 6	Industri Farmasi, Kosmetik, Jamu .....	65
Tabel. 7	Industri Bahan kimia.....	66
Tabel 8	Industri Perabot Rumah tangga/Mebel, Kayu,Gergaji, Kayu lapis	66
Tabel. 9	Industri Mi , Bihun.....	67
Tabel. 10	Industri Pelaposan Logam.....	67
Tabel. 11	Industri Tapioka.....	68
Tabel. 12	Industri Kecap, Saos, Minyak Goreng, Sirup.....	68
Tabel. 13	Industri Yang Mendapat Teguran Melalui Surat Peringatan.....	69
Tabel. 14	Pengambilan Sampel Air Limbah dan Penyidikan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	70

## ABSTRAK

Untuk menyelesaikan kasus/sengketa lingkungan hidup telah diatur instrumen penyelesaiannya dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melalui penyelesaian penegakan hukum administrasi, perdata, penyelesaian diluar pengadilan dan pidana. Berkaitan dengan kasus pencemaran di Kabupaten Karanganyar yang diproses oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan bagaimana pelaksanaan proses penegakan hukum pidana lingkungan hidup pada kasus pelanggaran baku mutu dan penerapan hukum asas subsidiaritas dalam tindak pidana lingkungan hidup pada kasus pencemaran. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat diskriptif analitis, dengan sampel satu industri yang memperoleh surat penghentian penyidikan (SP3), satu sampel industri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, satu sampel yang masih kasasi MA. Dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran kajian asas subsidiaritas dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dan analisis terhadap penyelidikan dan penyidikan kasus pencemaran lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Penyidik, penuntut umum dan hakim sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum pidana, pledoi para terdakwa melalui kuasa hukumnya yang disampaikan tidak mengandung argumentasi yang mencerminkan penguasaan materi hukum lingkungan hidup. 2). Putusan Hakim menciptakan delik melanggar baku mutu air limbah tanpa hukum yang konkret, melanggar asas subsidiaritas, tidak sesuai dengan pasal 183 ,Pasal 103 KUHAP, Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Perda Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

Rekomendasi yang diusulkan 1) Diperlukan mandat penguatan penegakan hukum lingkungan hidup meliputi : a). Strategi *Enforcement* satu atau yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah , Penyidik (gabungan polisi dan PPNS-LH) dan Jaksa Khusus;b). Pemberdayaan peradilan melalui pilihan model Hakim bersertifikat (*Certified Judges*) dengan Surat edaran Makamah Agung/Keputusan Makamah Agung;c). Pemerintah perlu menyusun rencana strategis pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia( SDM) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, Polisi, Jaksa dan Hakim dalam peradilan khusus lingkungan hidup;d). Melalui Surat Edaran Makamah Agung RI perlu Pembentukan Majelis Hakim dalam Persidangan Perkara Lingkungan Hidup yang terdiri dari 3-5 orang dan Hakim Adhoc dari pakar hukum lingkungan hidup;e). Dalam bentuk Undang Undang perlu diatur Pembentukan kamar kamar peradilan khusus lingkungan hidup di Pengadilan Negeri/P.TUN di daerah rawan kasus lingkungan hidup;f). Perlu regulasi pengawasan yang selama ini ada duplikasi kewenangan pengawasan antar sektor yang mengakibatkan pengawasan menjadi kurang efektif. 2) Bagi masyarakat meliputi : a). Diperlukan pendidikan hukum melalui program penyuluhan hukum terpadu antar Sektor terkait;b). Pemberdayaan masyarakat disekitar dampak industri melalui pembentukan kelompok Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) sebagai pos terdepan untuk komunikasi antar warga sekitar dampak dengan industri dan berfungsi sebagai polisinya lingkungan hidup.3) Bagi Pengusaha meliputi :a). Perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan hukum lingkungan hidup dengan dunia usaha terkait dengan penaataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;b). Perlu komitmen dunia usaha dalam mengelola lingkungan hidup dalam wujud dan kegiatan yang nyata.

**Kata Kunci :** Asas Subsidiaritas, Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.

## ABSTRACTION

To finished environmental case there have been arranged about the solution instrument in Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 about Environmental management that is through solution of straightening of administration law, civil , external solution of crime and justice. Relate to the contamination case in Kabupaten Karanganyar which processed by central java police region investigator and how is execution of process of straightening of environment criminal law at standard collision case of quality and applying of ground law subsidiaritas in environment doing an injustice at contamination case. To answer the problems of the method used in this research is having the character of diskriptif analitis, by using one sample industry obtaining the letter stop of investigation ( SP3), one sample industry which have obtained the remain legal force , one sample indusrty which still under appellate court. From this research is expected obtain;get the ground study picture subsidiaritas in straightening of environment doing an injustice law and analysis to investigation and investigation of case contamination of environment.

Research result indicate that :1) Investigator, publik prosecutor and judge is is very influenced by idea of criminal law, plea defendants through his law power which submitted is not containing the argument express domination of items punish the environment. 2). The judge decision create to glare at to impinge standardly quality irrigate the waste without the law konkret, impinge the ground subsidiaritas, disagree with section of 183 , Section of 103 KUHAP,governmental rules number 20 Tahun 1990 about Pengendalian Pencemaran Air and central java region rules number 10 Tahun 2004 abaut Baku Mutu Air Limbah.

**proposed recommendation** 1) Needed the reinforcement mandate of straightening of environment law cover : a). One roof enforcement strategy that is Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah , Penyidik ( police aliance and PPNS-LH) and special attorney;b). Enableness of jurisdiction with certified judges model choise ( Certified Judges) using appellate court letter circulation/appellate court decision;c). Government require to compile the strategic plan of institute development and Human resource( SDM) Functionary Pengawas Lingkungan Hidup, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, police, attorney and judge in special jurisdiction of environment ;d). ThroughRI appellate court handbill require to forming Majelis Hakim in environmental case conference which consist of 3-5 people and Hakim Adhoc who expert on environmental law e). in the form of Undang Undang needed to arrange special jurisdiction room forming;chamber room;chamber of environment in District court/P.TUN in region which gristle environmental case;f). Require to regulasi observation which during the time is duplication authority observation between the sector result the observation become less effective. 2)**for society cover** : a). Is needed the education of law through counselling program of inwrought law between related Sektor ;b). Enableness of society around industry impact through forming of group Sistem Pengawasan Masyarakat ( SISWASMAS) as outpost for communications between surounding citizen affect with industry and can be function as police of environment rule.3) **For Pengusaha cover** :a). Require to the existence of socialization to regulation of environment law with corporate world related to obedientness to law and regulation in environmental area ;b). Require to kcmitmen corporate world in managing the environment in real activity and form.

**Keyword :** Subsidiaritas, straightening of environment doing an injustice law